



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Bidik Target Potensial Pajak Daerah, Salah Satunya Galian C

ARGA MAKMUR – Tahun lalu Pemda Bengkulu Utara masih gagal memenuhi target pendapatan asli daerah atau PAD.

Dari Rp87 Miliar Pendapatan Asli Daerah, Pemda Bengkulu Utara 2023 lalu hanya bisa mencapai sebesar Rp81 miliar atau kurang sekitar Rp6 miliar.

Salah satu target pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang dibebankan di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda.

Setidaknya ada 10 item pajak daerah yang masuk dalam target Pendapatan Asli Daerah dengan total target hampir Rp28 Miliar.

Namun Bapenda sudah menyusun beberapa titik target pajak daerah yang memang potensial untuk terus meningkat bahkan overt target.

Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi menerangkan jika saat ini ada empat target pajak daerah yang sangat potensial dan cukup besar menyumbang ke kas pendapatan asli daerah.

Keempatnya adalah Pajak Galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan hingga Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

“Nomor pajak tersebut sangat besar berikut juga targetnya. Namun kita optimis karena memang potensi pajak yang bisa kita gali juga sangat besar,” terangnya.

Pajak MBLB memang setiap tahun rata-rata ver target, bahkan tahun ini Bapenda menargetkan

jumlah pajak yang bersumber dari MBLB akan lebih besar lagi menyumbang ke pendapatan asli daerah.

Apalagi dengan besarnya pembangunan fisik di Provinsi Bengkulu yang menggunakan material batu dan pasir dari Bengkulu Utara.

Bahkan saat ini Bapenda juga memperketat pengawasan perusahaan-perusahaan tambang batu yang ada di Bengkulu Utara.

“Kita akan melakukan pengawasan dan juga meminta pengusaha tambang melaporkan terkait hasil produksi sebenarnya, karena ini terkait dengan beban pajak yang harus ditagih oleh daerah,” terangnya.

Selain itu, BPHTB juga merupakan salah satu potensi pajak daerah besar di Bengkulu Utara.

Namun BPHTB terbesar biasanya terkait dengan pembayaran BPHTB dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu Utara.

Mulai dari pembebasan lahan hingga perpanjangan hak guna usaha yang merupakan potensi pajak BPHTB yang sangat besar bagi Bengkulu Utara.

“Besarnya jumlah perusahaan pemilik lahan di Bengkulu Utara memang menjadi salah satu potensi kita,” terangnya.

Sedangkan untuk BPHTB memang baru tahun 2023 lalu terjadi peningkatan setoran pendapatan asli daerah.

Ini menyusul Pemda Bengkulu Utara membentuk Satgas terkait peningkatan PBB yang dipimpin

peningkatan PBB yang dipimpin oleh Asisten dengan Anggota seluruh Camat dan Inspektur Inspektorat.

“Karena beban PBB pada warga ini sangat kecil, namun memang tingkat kepatuhan yang harus terus kita tingkatkan dan sejauh ini cukup berhasil,” terangnya.

Selain itu jumlah pendapatan asli daerah yang juga cukup besar adalah Pajak Penerangan Jalan Umum.

Bahkan besaran setoran pajak tersebut terbesar setiap tahunnya sebesar Rp11 Miliar lebih meskipun tak mencapai target.

Namun tahun ini target pajak daerah untuk PPJU menurun dari Rp15 Miliar tahun 2023 menjadi Rp11,5 Miliar tahun 2024 ini.

Markisman yakin dengan penurunan angka target tersebut maka setoran pajak akan bisa memenuhi target.

Setiap bulan rata-rata setoran pajak penerangan jalan umum diangka Rp800-900 juta.

Bahkan Pemda Bengkulu Utara juga aktif melakukan imbauan pada masyarakat untuk patuh membayar listrik untuk menekan angka tunggakan pembayaran listrik daerah.

“Pasalnya besaran pajak penerangan jalan umum tersebut merupakan 10 persen dari pembayaran listrik masyarakat. Maka angka tunggakan sangat berpengaruh pada besaran dana yang disetorkan ke pajak daerah,” pungkas Markisman. **(qia)**